

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adam Rahman, 2018, *Pelaksanaan Perizinan Pembuangan Limbah Cair Pada Kegiatan Jasa Laundry Di Kota Yogyakarta*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartodihardjo, H, 2009, *Kebijakan Sektor Kehutanan dan Implementasinya di Indonesia*. Bogor, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan, Bogor.
- Muhammad Julian, 2021, *Putusan MK: KK-PKP2B tidak otomatis dapat diperpanjang jadi IUPK*, Nasional Kontan.co.id, Jakarta.
- Niuewenhuis, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Terjemahan Djasadin Saragi, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rahmanto, Lucius Andik, 2010, *Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Terhadap Sengketa Pemecahan Tanah dan Balik Nama Sertifikat: (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor Perkara 87/Pdt. G/2020/PN Mjk)*, Universitas Mayjen Sungkono, Mojokerto, hlm. 56-63.
- Salim, 2003, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sihombing, R., 2021, *Transisi Hukum Pertambangan di Indonesia: Analisis Peralihan dari PKP2B ke IUPK*, Lembaga Kajian Hukum Energi, Jakarta
- Soekanto Soerjono, 1983, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali, Jakarta.
- Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sri Pujiyanti, 2021, *Aturan Jaminan Perpanjangan Menjadi IUPK bagi Swasta Inkonstitusional Bersyarat*, HUMAS MKRI, Jakarta.
- Subekti, 2002, *Hukum Perikatan*, Intermasa, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Sukandarrumidi, 2018, *Bahan-bahan Galian Industri*, UGM PRESS, Yogyakarta.
- Supranomo, 1986, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Tri Hayati, 2015, *Era Baru Hukum Pertambangan Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Vera Rimbawani Sushanty, 2020, *Buku Ajar Hukum Perjanjian*, Ubahara Press, Surabaya.

Winarta, F. H, 2022, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua* Sinar Grafika, Jakarta

Yustinus Ryan Widyatmoko, 2015, *Perizinan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Di Kota Bandar Lampung*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung.

Penulisan Skripsi/Thesis:

Naely Istiqomah, 2014, *Implikasi Perubahan Status Areal Penggunaan Lain (APL) menjadi Kawasan Hutan terhadap Perusahaan Tambang di Kabupaten Barito Utara Kalimantan*, Thesis S1, Universitas Islam Indonesia.

Juari Bulubara, 2024, *Penguasaan Tanah yang Berada Dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi di Kota Palangkaraya*, Thesis S1, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Priesty Putri, 2015, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Antara Pemilik Lahan Dengan Perusahaan Pertambangan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (Studi Kasus di PT IMMS Cabang Lumajang)*, Thesis S1, Universitas Brawijaya.

Lucius Andik Rahmanto, 2010, *Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Terhadap Sengketa Pemecahan Tanah dan Balik Nama Sertifikat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor Perkara 87/Pdt. G/2020/PN Mjk)*, Thesis S1, Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto.

Jurnal:

Saragih F, 2022, “Implikasi Fiskal dan Regulasi atas Peralihan PKP2B menjadi IUPK dalam UU Minerba”, *Jurnal Hukum Energi dan Sumber Daya Alam*, 10(2), 134–150.

Sulistiyani Eka Lestari dan Hardianto Djanggih, 2019, “Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup”, *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN: 2527-4716, Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang.

Muhammad Julian, 2021, “Putusan MK: KK-PKP2B tidak otomatis dapat diperpanjang jadi IUPK”, *Jurnal Nasional Kontan.co.id*, Jakarta.

Internet:

Direktorat Pengukuhan KLHK, Pelepasan Kawasan Hutan, <https://www.youtube.com/watch?v=NV0MtxVCyTA>, diakses 22 Juni 2025.

Edpraso, Menjembatani Pemahaman Praktek Pertambangan: Tahapan dan resiko penambangan (5), hlm. 1, <https://www.minerba.esdm.go.id/berita/minerba/detil/20121013-menjembatani-pemahaman-praktek-pertambangan-tahapan-dan-resiko-penambangan-5>, diakses 23 Juni 2025.

Normand Elnizar, Mau Skripsi Soal Pertambangan? Kenali 9 Izin Usaha Pertambangan Terkini, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mau-skripsi-soal-pertambangan-kenali-9-izin-usaha-pertambangan-terkini-lt633ea3ac1df65/?page=2>, hlm. 1, diakses 22 Juni 2025.

RSP Law Auditor, Pemahaman Seputar Hukum Pertambangan, <https://www.youtube.com/watch?v=DQTux5vfqwA&list=PLKGOgIztZgjNLx3UYjH-UW96r67uajmo->, diakses 20 Maret 2018.

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang – undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.27/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin pemanfaatan Kayu yang sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 14/Menhut-Ii/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XVIII/2020.



LAMPIRAN

Wawancara dengan Bapak I Gede Adnyana Putra AK selaku *Land Management Departement Head* PT. Kideco Jaya Agung



Sumber: PT. Kideco Jaya Agung

Wawancara dengan Staff *Land Management*



Sumber: PT. Kideco Jaya Agung

Wawancara dengan Kundori selaku Permit Section Head PT. Kideco Jaya Agung
Manipan Taufik M. Selaku Permit Sub Sect. Head PT. Kideco Jaya Agung



Sumber: PT. Kideco Jaya Agung